

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENTASAN  
KEMISKINAN PERKOTAAN  
(Studi Deskriptif di Kota Bandar Lampung)**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF URBAN POVERTY REDUCTION  
(The Study of Deskriptif in the City of Bandar Lampung)**

**Oleh  
Agus Purnomo dan Sefty Setya Utami**

**ABSTRACT**

*The problem in this research is still still high number of poverty in the city of Bandar Lampung it looks from within the last three years poverty slowed down around 10.15%. Based on this goal in this research is to know the urban poverty alleviation program execution performed by the government of the city of Bandar Lampung and factor endowments and a barrier to the implementation of the reduction program urban poverty in doing by the City Government Bandar Lampung. The design used in this study is a qualitative research design. The techniques used in collecting data, among others, by way of observation, interview and documentation. Data analysis technique used is an interactive model of analysis that includes the reduction of the data, the presentation of data and verification. Based on the results of the study can then note that: (1) the implementation of poverty reduction programs in urban do by City Government Bandar Lampung is done in several ways, among others: (a) human/community empowerment Program implemented by the local Government of the city of Bandar Lampung through urban poverty reduction program still less effective. (b) Empowerment efforts carried out by the local Government of the city of Bandar Lampung actually being good. (c) environmental empowerment Program implemented by the local Government of the city of Bandar Lampung via P2KP team still need thorough evaluation. (2) the supporting Factors, among others: the existence of a coordination and a good sinergisitas of actors involved as well as financial support from the local government are adequate. Factors restricting ie: Less active facilitators P2KP, less pahamnya society, the data collected are still less accurate and less community engagement.*

**Keywords:** *Implementation, Poverty, Government*

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah masih masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung hal itu terlihat dari dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan melambat sekitar 10.15%. Berdasarkan hal tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa: (1) Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang di

lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

(a) Program pemberdayaan manusia/masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) masih kurang efektif. (b) Pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebetulnya sudah baik. (c) Program pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui tim P2KP masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh. (2) Faktor pendukung antara lain: adanya koordinasi dan sinergisitas yang baik dari aktor yang terlibat serta Dukungan finansial dari pemerintah daerah yang mencukupi. Faktor penghambat yaitu: Kurang aktifnya fasilitator P2KP, kurang pahamiannya masyarakat, data yang dihimpun masih kurang akurat dan Keterlibatan masyarakat kurang merata.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kemiskinan, Pemerintah

## **I. PENDAHULUAN**

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis dan masif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran),

serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk menyatakan kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan, berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita pada kelompok referensi (*reference population*). *Reference population* didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal yaitu mereka hidupnya dikategorikan berada diatas garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) dinyatakan dalam indikator kemiskinan, menurut BPS garis kemiskinan Indonesia 2015 adalah (dalam rupiah) Rp.356.378.00 untuk perkotaan perkapita dalam sebulan dan Rp.333.034,00 untuk perdesaan perkapita dalam sebulan, karena penelitian ini meneliti di Kota Bandar Lampung maka garis kemiskinan yang

digunakan adalah garis kemiskinan perkotaan. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga dibayangkan- bayangi oleh keberadaan *vulnerable group*. Kelompok ini (*vulnerable group*) dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut *near poor* (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya, mereka seringkali berpindah dari status rentan menjadi miskin bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial. Kelompok ini berada pada tingkatan sama atau dekat dengan garis kemiskinan tetapi sangat beresiko untuk sewaktu-waktu menjadi kelompok miskin apabila terjadi tekanan eksternal, seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, pemutusan hubungan kerja, konflik sosial maupun bencana alam kelompok ini beresiko untuk menjadi miskin.

Sedangkan indikator tingkat kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandar Lampung No. 518/III.17/HK/2013 tentang penetapan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai lembaga penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan se-Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa kemiskinan terbagi menjadi 3 (tiga) miskin, miskin sekali dan paling miskin. Miskin yaitu apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 Kg nilai tukar beras per orang per tahun sedangkan miskin sekali apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 Kg nilai tukar beras per orang per tahun serta paling miskin yaitu apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

angka kemiskinan di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi di mana angka kemiskinan paling tinggi berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan total kemiskinan sebesar 6.869 jiwa sedangkan angka kemiskinan paling rendah berada di Kecamatan Tanjung Seneng yaitu sebesar 952 jiwa. Sedangkan dilihat secara menyeluruh angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung relatif menurun walaupun dalam beberapa tahun penurunan cenderung melambat yaitu sebesar 10.60% di tahun 2014, 10.33% di tahun 2015 serta 10.15% di tahun 2016, menurunnya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan di sebabkan oleh kondisi perekonomian yang relatif sudah stabil, harga pokok sudah mulai mengalami penurunan dan rata-rata upah juga mengalami kenaikan.

Angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung yang cenderung melambat dalam tiga tahun terakhir ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Bandar Lampung yang terus mengalami kenaikan dan perkembangan yang pesat, masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung membuat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membuat sebuah program untuk pengentasan kemiskinan yang ada di perkotaan, beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung antara lain Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK), Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (DBUKID), Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (P2USEP), Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Program Pemberdayaan Masyarakat

Berkelanjutan (P2MB), Program Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pos Pembedayaan Masyarakat (Posdaya) dan Perogram Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri.

Dalam implementasinya program- program tersebut acapkali tidak bisa berjalan sesuai target dan tujuan, program tersebut dirancang tanpa menghiraukan karakteristik masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung serta tidak melihat perbedaan persoalan yang dihadapi di setiap masyarakat yang ada di kelurahan. Selama ini masyarakat cuma dituntut partisipasinya tanpa dilibatkan dalam perencanaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya, selain itu program-program tersebut dianggap telah berhasil dalam mengatasi kemiskinan hanya ketika program tersebut masih berlangsung setelah program tersebut selesai, maka pemerintah dan masyarakat juga selesai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pernah dicanangkan dalam program pengentasan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan di perkotaan merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam pengentasan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai- nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Program pengentasan kemiskinan perkotaan diharapkan mampu mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Bandar

Lampung. Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 10%. Sebagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, Program pengentasan kemiskinan perkotaan diharapkan mampu mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat setempat secara terorganisasi dalam pengentasan kemiskinan, artinya program ini berpotensi sebagai gerakan masyarakat yakni dari, oleh dan untuk masyarakat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

Menurut Kuncoro (2007:102-103), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Definisi tersebut menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu:

- (1) Bagaimana mengukur standar hidup,
- (2) Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum dan (3) Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit. Rumusan kemiskinan menurut Friedmann (2012:18), sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut: (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya), (2) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan), (3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, (4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia serta
- (4) Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Menurut Sallatang (2006:162), kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan kepemilikan kekayaan materil, tanpa mengabaikan standar atau ukuran- ukuran fisiologi, psikologik dan sosial. Sementara itu Esmara (2006:18), mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Menurut Bradshaw (2005:152), merumuskan kemiskinan sebagai situasi yang serba kekurangan makanan pokok, tempat berlindung, sarana kesehatan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan bersifat relatif dan

berdasarkan pada definisi sosial dan pengalaman masa lalu (Sen, 2009:172). Menurut Sen (dalam Banarjee, 2006:10) berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat berdasarkan ketidakcukupan pendapatan namun lebih luas lagi. Kemiskinan adalah ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk memperoleh fungsi minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini termasuk tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memperoleh kecukupan makanan, pakaian, atau tempat berlindung (kemiskinan karena pendapatan) atau tidak mampu mengobati penyakit ke sarana kesehatan (kemiskinan karena kesehatan yang buruk), juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan, partisipasi politik, atau peran didalam bermasyarakat.

Menurut Sumodiningrat (2009:26). menyatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya, sedangkan Kartasmita (2007:234), mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasmita mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedman (2012:123), yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial.

Gambaran kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan, ketiadaan tempat

berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada suatu hari berikutnya. Potret kemiskinan lainnya adalah kehidupan tidak sehat yang disebabkan oleh air yang kotor, ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi dan kebebasan. Kemiskinan yang dipahami memiliki konsep multidimensional mencakup seluruh indikator kesejahteraan, mempunyai banyak wajah, yang berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Pengertian ini dikenal dengan kemiskinan struktural, kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berhubungan erat dengan berbagai dimensi kehidupan manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan, masa depan dan peranan sosial. Sehingga agar kemiskinan tersebut dapat dipahami secara utuh maka dimensi-dimensi lain dalam kehidupan juga harus diperhitungkan. Adapun dimensi- dimensi tersebut antara lain: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), tidak adanya/kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, maupun transportasi, kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam, tidak adanya jaminan masa depan

akibat rendahnya investasi pendidikan keluarga, tidak adanya/kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, ketidakberdayaan akibat adanya cacat fisik dan mental serta ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita akibat kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin atau karena merupakan kelompok marjinal dan terpencil. Lembaga Penelitian SMERU (2011:1) menyatakan pengertian lain kemiskinan yakni sebagai ketidakmapuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Mudrajat Kuncoro (2007:123), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua elemen yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya serta (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Suyanto (2015:59), mendefinisikan kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan, keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinandeterminan sosial- budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya).

Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu *sudah takdir* dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai surat nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri.

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang bahwa kemiskinan memiliki manifestasi yang bervariasi, termasuk keterbatasan pendapatan dan kecukupan sumber daya produksi untuk menjamin mata pencaharian secara terus-menerus, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan yang rendah, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar, peningkatan jumlah penderita penyakit dan kematian karena penyakit, gelandangan dan rumah kumuh, lingkungan yang tidak sehat, serta diskriminasi sosial dan keterasingan. Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan pada partisipasi pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (utama), yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan dan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena dalam

kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).

Menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas), (2013:54), dijelaskan bahwa sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh antara lain:

1. Melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural
2. Melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil.

Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin bertujuan membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus dengan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga

miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; (2) pengendalian harga bahan pokok; (3) penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (4) perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok dan (5) perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih.

Untuk program pengembangan budaya usaha masyarakat miskin dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah: (1) pengembangan pendidikan dan latihan ketrampilan kerja, (2) pendampingan melalui bimbingan konsultasi, (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi, (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya, (5) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian.

Bank Dunia (dalam Suyanto, 2015:29), berkesimpulan bahwa strategi yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan terdiri atas dua bagian yang

saling menunjang dan sama pentingnya, yaitu:

1. Penciptaan peluang kerja bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber pendapatan melalui pola pembangunan yang menggalakkan penggunaan tenaga kerja secara efisien
2. Meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara meningkatkan pelayanan-pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, dan lain- lain) bagi kaum miskin.

Pengentasan kemiskinan perkotaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya
- b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM)
- c. Mengedepankan peran pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui

pengokohan Komite Pengentasan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah yang terpenting semua program itu harus mengacu pada strategi Tridaya hal itu sesuai dengan penjelasan dari Panduan Pelaksanaan P2KP (2014:10-11), yakni meliputi:

1. Pemberdayaan manusia  
Pemberdayaan manusia dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat miskin itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan.
2. Pemberdayaan usaha  
Pemberdayaan usaha yang dimaksud adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berusaha dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dan meningkatkan serta mengembangkan ketrampilan berusaha melalui kelompok usaha bersama. Program pemberdayaan usaha, antara lain upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha melalui pelatihan wirausaha, pengadaan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha kecil, pemberian fasilitas untuk pembentukan asosiasi kelompok usaha (nelayan, tani, industri kecil dan sebagainya), misalnya pendirian koperasi-koperasi/KUBE sentra sesuai dengan kebutuhan, memotivasi dan mendorong keluarga miskin dalam mengembangkan diri yaitu mengadakan penyuluhan atau tambahan pengetahuan melalui ceramah-ceramah agama atau pertemuan-pertemuan lain,

penyediaan modal kerja dalam bentuk pinjaman atau kredit atau model pinjaman bergulir, pembuatan air bersih dan MCK, atau berupa kegiatan pembangunan jalan lingkungan/setapak.

3. Pemberdayaan lingkungan Pemberdayaan lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan arti penting lingkungan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2013:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Observasi  
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti, melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai obyek yang diamati, karena peneliti dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung.
2. Wawancara  
Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

### 3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian dalam aplikasinya selama proses penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman, yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa::

- 1 Reduksi data (*reduction data*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicaritema dan polanya, Sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- 1 Penyajian data (*data display*) Setelah direduksi data maka langkah selajutnya adalah mendisplay data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
- 1 Verifikasi (*conclusion drawing*) Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan awal ditemukan ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian**

##### **1. Pemberdayaan Manusia/Masyarakat**

Hasil observasi penelitian di ketahui bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan sampai saat ini masih sebatas aspek kognitif dan aspek psikomotorik sedangkan aspek afektif serta aspek konatif dibentuk secara mandiri oleh individu atau masyarakat, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung selama ini hanya fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan sedangkan dari sisi efektif misalnya itu masih sangat kurang hal itu terlihat dari kurangnya motivasi yang diberikan oleh fasilitator P2KP kepada masyarakat untuk lebih aktif lagi untuk berperan dalam pembangunan serta kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan dalam melaksanakan setiap program- program yang sudah diberikan hal itu dikarenakan paradigma masyarakat miskin yang ingin selalu mendapatkan fasilitas pemberdayaan tanpa harus mengembangkan ide-ide kreatif atau inovatif yang dimiliki di setiap individu/masyarakat.

Hasil wawancara dapat di ketahui bahwa program pemberdayaan manusia/masyarakat yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) masih kurang efektif di mana upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih hanya sebatas peningkatan keterampilan dan pengetahuan tetapi tidak ada upaya *supporting* program dari fasilitator P2KP hal itu terlihat dari kurangnya kegiatan pendampingan oleh fasilitator kepada masyarakat sasaran program sehingga menimbulkan masyarakat kurang terampil, kurang memiliki pemikiran yang inovatif serta kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program P2KP dalam menjalankan program- program yang sudah diberikan walaupun masyarakat sudah menerima/mengikuti kegiatan pelatihan.

## **2. Pemberdayaan Usaha**

Hasil observasi penelitian di ketahui bahwa program pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pengentasan kemiskinan sudah baik tetapi masih perlu adanya optimalisasi di mana pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memberdayakan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan dengan cara membagi kelompok usaha di setiap kelompok berjumlah 10 orang dengan jenis kegiatan usaha bervariasi serta memberikan bantuan dana bergulir khusus perempuan. Namun masih memerlukan optimalisasi hal itu dikarenakan ada beberapa kelompok yang terbesar di beberapa kelurahan masih kurang berjalan serta dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat juga tidak berjalan dengan baik hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang

memiliki persepsi dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat itu dihibahkan atau diberikan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengembalikannya dana bergulir tersebut.

Hasil wawancara dapat di ketahui bahwa pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebetulnya sudah baik di mana pemerintah membuat beberapa program pemberdayaan usaha mulai dari pengembangan usaha ekonomi kreatif, membuat kelompok usaha dengan 4 usaha yang berbeda yaitu usaha ekstraktif, usaha budidaya perikanan dan peternakan, usaha industri dan usaha perdagangan serta memberikan dana bergulir kepada kelompok perempuan untuk mengembangkan usaha ataupun menciptakan usaha. Namun kegiatan pemberdayaan usaha tersebut masih memerlukan evaluasi hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi mulai dari bantuan usaha yang tidak merata untuk masyarakat miskin, kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator P2KP yang membuat banyak program pemberdayaan usaha tidak berjalan bahkan berhenti serta kurang pahamiannya masyarakat penerima bantuan pemberdayaan masyarakat hal itu terlihat dari banyak masyarakat yang tidak mengembalikan dana bergulir atau masyarakat yang mengembalikan dana bergulir dengan tidak tepat waktu sehingga kegiatan pemberdayaan melalui dana bergulir tidak berjalan sesuai dengan target dan harapan dari pemerintah daerah.

### **3. Pemberdayaan Lingkungan**

Hasil observasi penelitian di ketahui bahwa kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan lingkungan di nilai oleh sebagian besar masyarakat di Kota Bandar Lampung masih kurang efektif sehingga tidak terlalu berpengaruh dengan keadaan kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung, di mana kegiatan berdayaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung adalah perbaikan infrastruktur di lingkungan masyarakat sasaran program P2KP mulai dari pembuatan dan perbaikan MCK komunal, pelebaran dreanase di sekitar pemukiman masyarakat, penambahan sarana usaha serta perbaikan rumah layak huni (mahyani) atau bedah rumah semua sudah dijalankan namun hasilnya masih jauh dari kata optimal misalnya perbaikan dan pembuatan MCK komunal sampai dengan akhir tahun 2017 pembuatan dan perbaikan MCK komunal untuk masyarakat miskin tidak semua kelurahan mendapatkan program tersebut hanya kelurahan yang angka kemiskinannya terbesar yang mendapatkan program tersebut yaitu di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah penduduk miskin sekitar 6.869 jiwa sedangkan untuk kelurahan yang lain sampai saat ini belum terealisasi. Program perbaikan rumah layak huni (mahyani) atau bedah rumah sampai diakhir tahun 2017 kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya mencapai 150-200 unit di seluruh kelurahan Kota Bandar Lampung pada hal berdasarkan data BPS Tahun 2016 rumah yang tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat dengan kategori miskin, miskin sekali dan

paling miskin mencapai 3.710 rumah pada hal dana yang sudah di keluarhan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program ini mencapai Rp.4.5 Milyaar dengan rata-rata penerima bantuan sebesar Rp.10.000.000.00 – Rp. 15.000.000.00.

Hasil wawancara dapat di ketahui bahwa program pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui tim P2KP masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh mengingat program- program yang direalisasikan banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun serta harapan dari masyarakat kalangan miskin, paling miskin dan miskin sekali, pada hal ketika program pemberdayaan lingkungan berjalan dengan baik maka kualitas lingkungan pemukiman masyarakat yang tergolong miskin, paling miskin dan sangat miskin tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari- hari dengan nyaman dan aman serta kegiatan perekonomian dapar berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan program pemberdayaan pemerintah.

### **Pembahasan**

Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) bertujuan mempercepat penurunan jumlah masyarakat miskin, adapun langkah- langkah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara peningkatan pendapatan. Caranya melalui peningkatan produktivitas masyarakat miskin dan membuka usaha

produktif. Dana bergulir yang berasal dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sangat bermanfaat bagi peserta program untuk membuka usaha atau mengembangkannya setelah sebelumnya mereka dibekali keterampilan yang terkait dengan usahanya sehingga resiko gagal dapat dihindari, di beberapa kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung usaha produktif yang dilakukan masyarakat miskin penerima dana bergulir P2KP berupa bengkel, pembibitan lele, warung, pembuatan kue, dan lain-lain relatif sudah berjalan dengan baik namun masih perlu optimalisasi hal itu dikarenakan banyaknya penerima dana bergulir yang tidak berhasil mengembangkan usahanya dikarenakan kurang intensinya pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator P2KP. Sehingga dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, memungkinkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, hidup layak, dan infrastruktur. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh individu berupa uang dari usaha produktif yang dilakukan sebagai bentuk penerimaan dana bergulir Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Keberhasilan P2KP diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peningkatan kesejahteraan tersebut dapat diukur dari adanya peningkatan pendapatan dan terciptanya kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat miskin untuk membuka dan mengembangkan usaha produktif. Kemampuan ini bisa didapatkan dengan belajar sendiri maupun bantuan dari pihak lain dengan

pemberian pelatihan ketrampilan usaha. Pelatihan ketrampilan yang diberikan kepada para peserta P2KP di beberapa kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung berupa usaha salon, pembibitan lele, manajemen usaha, konfeksi, bengkel, dan sebagainya.

Keberhasilan pelaksanaan program P2KP tersebut seharusnya diimbangi dengan efektifitas pelaksanaan program P2KP di mana masih ada beberapa program yang dinilai kurang efektif sehingga berdampak pada lambatnya pelaksanaan program P2KP yang ada di Kota Bandar Lampung, penilaian efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menghubungkan proses pemberdayaan masyarakat dengan perubahan kondisi masyarakat (kemiskinan) pada dasarnya mekanisme pelaksanaan program P2KP telah mengakomodasi terciptanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Secara umum pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan P2KP yang ada di Kota Bandar Lampung cukup efektif yaitu mencapai 63%. Sedangkan masyarakat yang mendapatkan bantuan program P2KP juga mengalami peningkatan hal itu terlihat dari kondisi kualitas hidupnya setelah mendapatkan program P2KP. Pengaruh dari program P2KP bagi masyarakat miskin penerima manfaat di Kota Bandar Lampung paling besar pada pemberdayaan manusia yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan kesehatan, pendidikan dan juga kualitas masyarakat miskin itu sendiri. Sedangkan pemberdayaan ekonomi atau usaha juga memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Bandar

Lampung hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat berusaha untuk selalu mengaplikasikan bantuan yang mereka dapatkan untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka. Pemberdayaan lingkungan kurang mendapatkan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung hal itu terlihat dari belum adanya perubahan signifikan terhadap kualitas lingkungan permukiman masyarakat penerima bantuan sehingga masyarakat dalam menjalani kehidupannya kurang begitu nyaman dan merasa aman serta dana bantuan yang tidak merata dalam proses penyalurannya pada hal kondisi dan situasi yang dialami oleh penerima bantuan sama.

Kurang efektifnya sebagian program P2KP tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran yang besar dalam pembangunan. Besar atau kecilnya peran masyarakat dalam membangun ditentukan oleh kemauan dan kemampuan masyarakat. Menurut Clegg dan Marginn dalam Lawson dan Kearns (2010:1462), pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya oleh karena itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (*power*). Masyarakat memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh tergantung berbagai faktor yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya dan konteks organisasi sebagai pendukung. Untuk diberdayakan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis, memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan kemampuan untuk bertindak. Dalam proses pemberdayaan program P2KP di Kota Bandar Lampung masyarakat sudah mempunyai kesadaran berubah atau

meningkatkan hidup mereka dengan mengikuti setiap program yang dilaksanakan akan tetapi masyarakat kurang dilibatkan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan di kelurahan. Hanya aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat miskin yang dilibatkan dalam membuat keputusan sehingga kegiatan atau bantuan yang diberikan kurang bermanfaat bagi mereka karena kurang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Somerville dalam Lawson dan Kearns (2010:5), bahwa dengan kunci pemberdayaan adalah menempatkan warga atau masyarakat dalam posisi di mana mereka dapat memilih cara yang mereka inginkan untuk terjadinya perubahan ini mungkin melibatkan individu-individu dalam masyarakat dalam memilih jenis yang mereka sukai dan keterlibatan pada tingkatan partisipasi. Sehingga dengan demikian mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan masih sangat kurang masyarakat kurang bisa memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga bantuan terkesan sia-sia dan tidak berdampak pada penyelesaian kemiskinan banyak faktor yang menyebabkan masyarakat seperti itu yaitu, bantuan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, kurangnya modal usaha (financial) dan sifat masyarakat yang malas berusaha.

## **V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Kesimpulan**

1. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan dalam beberapa cara antara lain:
  - a. Program pemberdayaan manusia/masyarakat yang

- dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) masih kurang efektif hal itu terlihat dari kurangnya kegiatan pendampingan oleh fasilitator kepada masyarakat sasaran program serta kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program dalam menjalankan program-program yang sudah diberikan
- b. Pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebetulnya sudah baik di mana pemerintah membuat beberapa program kelompok usaha dengan 4 usaha yang berbeda yaitu usaha ekstraktif, usaha budidaya perikanan dan peternakan, usaha industri dan usaha perdagangan serta memberikan dana bergulir
  - c. Program pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui tim P2KP masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh mengingat program-program yang direalisasikan banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun serta harapan dari masyarakat kalangan miskin, paling miskin dan miskin sekali.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung:
- a. Faktor pendukung antara lain:
    - 1) Adanya koordinasi dan sinergisitas yang baik dari aktor yang terlibat
    - 2) Dukungan finansial dari pemerintah daerah yang mencukupi.

- b. Faktor penghambat yaitu:
- 1) Kurang aktifnya fasilitator P2KP
  - 2) Kurang pemahamnya masyarakat yang berada pada kategori miskin, paling miskin dan miskin sekali terhadap program pemberdayaan
  - 3) Data yang dihimpun oleh tim fasilitator P2KP masih kurang akurat
  - 4) Keterlibatan masyarakat kurang merata dalam setiap kegiatan pemberdayaan.

### **Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat/keluarga miskin yang menjadi sasaran program, melibatkan mereka dalam menentukan jenis program yang dibutuhkan merupakan salah satu kunci ketepatan menentukan jenis program yang dibutuhkan dan masyarakat/keluarga yang berhak menerima program tersebut
2. Pemberdayaan dalam program pengentasan kemiskinan sebaiknya diposisikan sebagai proses, sehingga diharapkan masyarakat mengikuti setiap proses dalam pengentasan kemiskinan seperti masyarakat penerima manfaat ikut terlibat dalam memutuskan kegiatan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat tercapai yaitu menjadikan masyarakat miskin yang tidak berdaya menjadi berdaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan
3. Memberikan pendampingan kepada masyarakat setelah Program

Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terlaksana sehingga masyarakat mempunyai keyakinan dan kemauan untuk memanfaatkan apa yang mereka peroleh guna meningkatkan taraf hidup mereka

4. Kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) harus lebih aktif memonitor yang mengevaluasi penggunaan dana agar tepat sasaran sehingga dapat menghindari kegagalan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. 2009. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Pekembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi*. Publikasi susenas
- BPS. 2008. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. World Bank Institute.
- BPS. 2017. *Provinsi Lampung dalam Angka 2017*. BPS Provinsi Lampung
- BPS. 2017. *Bandar Lampung dalam Angka 2017*. BPS Bandar Lampung
- BAPPENAS. 2007. *Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2010. *Pendataan Keluarga, Selayang Pandang*. Diakses 16 Oktober 2017 dari BKKBN.

[http://www.bkkbn.go.id/article\\_detail.php?aid=49](http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=49)

- Bradshaw, Ted K., 2005. *Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs inCommunity Development*. Community Development: Journal of the Community Development Society, vol.38, No. 1.
- Banarjee, A.V., Benabou, R., dan Mookherjee, D., 2006. *Understanding Poverty*. New York: Oxford University Press.
- Baswir, Revrison. 2007. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esmara, H., 2006. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Friedman, J. 2012. *Urban Poverty in America Latin, Some Theoretical Considerations*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Flamma. Edisi 25. Volume 10. April – Juni.2006. Yogyakarta : Flamma
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kartasmita, Ginanjar. 2007. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakary
- Purnomo, Agus. 2017. Penguatan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Daya Saing UKM Produk Unggulan di Kota Bandar Lampung. *Sosialita*. 9(2), 64-72.